

Penjualan Saham Bir Ditolak, Wagub Tunggu Sikap Resmi DPRD DKI

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, penjualan saham bir PT Delta Djakarta masih berlanjut.

Menurutnya, pencaangan penjualan saham seperti yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan masih dikaji oleh legislatif. Rencana penjualan saham PT Delta Djakarta itu menjadi salah satu janji Anies di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

Ditanya dorongan Pemprov DKI kembali untuk menjual saham 25,26 persen setelah sebelumnya ditolak DPRD DKI, Riza membenarkannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, sambung dia, masih akan menunggu keputusan resmi dari DPRD DKI. "Nanti kami koordinasikan lagi dengan DPRD," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4) malam WIB.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI beralih jika proses penjualan saham bir akan ter-

us berlanjut. Aral melintang, tak ada lagi kabar dorongan dari Pemprov DKI untuk merealisasikan penjualan saham minuman beralkohol itu.

Riza menuturkan beberapa waktu lalu, penjualan saham bir tidak sama seperti menjual barang pada umumnya. Menurut dia, ada berbagai proses dan tahapan untuk menghilangkan kepemilikan DKI di perusahaan pembuat bir itu. "Salah satunya harus mendapat persetujuan dari teman-teman di DPRD DKI Jakarta," jelas ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut.

Sayangnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi enggan untuk menyetujui atau ikut terlibat dalam penjualan saham tersebut. Menurut politikus PDIP itu, penanaman saham DKI di PT Delta Djakarta yang dilakukan sejak 1970-an era Ali Sadikin berhasil memberi keuntungan yang besar bagi Pemprov DKI. ● yan

Pemkab Bekasi Kembali Raih Predikat B Pada Evaluasi SAKIP



FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI.

Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP dan RB oleh KEMENPAN-RB yang dilangsungkan secara hybrid di Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Selasa (5/4).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali meraih Predikat B pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Predikat CC pada evaluasi Reformasi Birokrasi (RB).

Pt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP dan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), yang dilaksanakan secara hybrid, di Command Center Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Selasa (5/4).

Marjuki mengatakan, bahwa Pemkab Bekasi telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan SAKIP dan RB, namun hasil evaluasi yang diberikan oleh KEMENPAN-RB tahun 2021 masih sama seperti hasil evaluasi pada tahun 2020.

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi penilaiannya masih bertahan

di B untuk SAKIP, dan CC untuk RB," sebutnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (5/4).

Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini, Pemkab Bekasi akan mengevaluasi kinerja seluruh perangkat daerah dan berupaya untuk mengimplementasikan SAKIP dan RB dengan lebih baik lagi.

"Banyak hal yang sudah kami lakukan, tapi yang terpenting bagaimana ke depan kita mengevaluasi diri dan kinerja kita agar bisa lebih maksimal lagi," ucapnya.

Terakhir, ia meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi untuk dapat menetapkan langkah dalam memperbaiki SAKIP, sehingga pada evaluasi tahun 2022 ini predikat penilaian pada SAKIP dan RB bisa mencapai target.

"Saya berharap ke depan semua pejabat Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan kinerja dan menetapkan langkah perbaikan agar di penilaian tahun 2022 ini bisa mencapai target kita," ujarnya. ● mdl

Cek Pergerakan Tanah, BPBD DKI Turunkan Tim Reaksi Cepat

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan pemantauan hingga sosialisasi terkait potensi pergerakan tanah ke lokasi.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menginformasikan adanya potensi pergerakan tanah di beberapa wilayah di Jakarta berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Mereka akan mengecek, memantau lokasi-lokasi khususnya di Jaksel dan Jaktim yang rawan longsor," kata Kepala Satuan Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji saat dihubungi, Selasa (5/4).

Pemeriksaan akan dilakukan khususnya di bangunan di tepi sungai, waduk atau danau.

Selain itu, TRC juga akan bersama-sama dengan aparat RT dan RW melakukan sosialisasi kepada warga.

"Mereka akan memperhatikan warnanya untuk sementara tidak menggunakan bangunan-bangunan di lokasi rawan longsor apalagi saat

hujan ekstrem," ujarnya.

Isnawa melanjutkan, masyarakat harus waspada pada tanda-tanda pergerakan tanah maupun longsor dan segera melaporkan apabila menemukan tanda tersebut ke aparat RT, RW, maupun kelurahan untuk segera ditindaklanjuti.

"Longsor bisa terjadi dalam waktu cepat maupun lambat. Untuk yang lambat akan terjadi perlahan. Tandanya adalah ada retakan pada tanah atau dinding rumah/bangunan. Retakan harus segera ditutup agar menutup celah dari masuknya air. Air dapat memperparah kondisi bangunan atau tanah bila masuk ke sela-sela retakan," jelasnya.

Untuk wilayah-wilayah yang terdeteksi rawan pergerakan tanah yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan.

Kemudian pergerakan tanah juga rawan terjadi di Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati, dan Pasar Rebo. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PPKM LEVEL 2 JAKARTA DIPERPANJANG

Warga yang terjaring razia protokol kesehatan PPKM level 2 dihukum menyapu di Pondok Labu, Jakarta, Selasa (5/4). PPKM level 2 untuk wilayah DKI Jakarta kembali diperpanjang selama dua pekan mulai 5 hingga 18 April 2022.

DITUDING BERPIHAK PADA PT KCN

Warga Rusunawa Tuntut Pencopotan Kepala KSOP Marunda

Pihak KSOP Marunda terkesan membantah adanya pencemaran lingkungan di sana yang disebabkan oleh aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN). KSOP juga dituding bertindak layaknya juru bicara PT KCN. Alih-alih menindaklanjuti laporan warga soal pencemaran abu batu bara di Marunda, KSOP Marunda bahkan melakukan pembiaran.

JAKARTA (IM) - Warga Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, menuntut pencopotan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Isa Amsyari sebagai tindak lanjut dari pencemaran lingkungan di sana.

Ketua Forum Rusunawa Marunda, Didi Suwandi men-

gatakan, pihak KSOP Marunda terkesan membantah adanya pencemaran lingkungan di sana yang disebabkan oleh aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN). KSOP juga dituding bertindak layaknya juru bicara PT KCN, alih-alih menindaklanjuti laporan warga soal pencemaran abu batu bara di Marunda.

"Intinya kami minta pihak kementerian untuk segera mencopot KSOP Marunda karena sudah melakukan pembiaran. Ini bisa jadi gugatan hukum karena dia sebagai regulator sudah melakukan pembiaran sehingga perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut tidak menjalankan regulasi," ujar Didi, dalam audiensi bersama Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/4).

Menurut dia, KSOP Marunda tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai otoritas pelabuhan. Seharusnya, kata Didi, KSOP Marunda mengevaluasi dan monitoring wilayah kerjanya. "Artinya seharusnya saat kami nyatakan ada pencemaran, harusnya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) bukan malah jadi juru bicara PT KCN dan melakukan pembenaran-pembenaran," kata

dia. Bahkan, kata Didi, Kepala KSOP Pelabuhan Marunda mengatakan bahwa di wilayah kerja mereka tidak ada pelanggaran dan menyatakan pencemaran batu bara sudah berasal dari pelabuhan.

Padahal, menurut Didi, salah satu buktinya adalah adanya mobil truk tanpa terpal yang tetap mengangkut batu bara.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami. Kalau sesuai SOP, pasti debu batu bara sudah tidak ada lagi," kata Didi.

Oleh karena itu, Forum Rusunawa Marunda pun menduga KSOP Marunda tidak mau mengurus masalah pencemaran tersebut.

Oleh karena itu, warga meminta agar Kementerian Perhubungan mencopot Kepala KSOP Marunda, Isa Amsari.

"Karena sudah melakukan pembiaran dan ini bisa jadi gugatan hukum karena dia sebagai regulator sudah

melakukan pembiaran tidak menjalankan regulasi sehingga perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut tidak menjalankan regulasi," ujar dia.

Pihaknya pun mendorong agar KSOP Marunda menjalankan regulasi yang ada dan bisa memonitor serta mengevaluasi pelabuhan yang ada di Marunda. "Jangan sampai opini masyarakat KSOP jadi juru bicara KCN. Tidak posisi menengahi adanya masalah ini," kata dia.

Diketahui, audiensi dilakukan oleh Forum Rusunawa Marunda didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kedatangan mereka diterima oleh Kepala KSOP Tanjung Priok, Wisnu Handoko dan berdiskusi tentang masalah tersebut.

Wisnu mengatakan, pihaknya akan meneruskan keluhan-keluhan warga tersebut ke Kementerian Perhubungan. ● yan

Pemkab Bekasi Apresiasi Kinerja Satgas Citarum Harum

BANDUNG (IM) - Pt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Akhmad Marjuki, mengapresiasi capaian Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum yang telah berhasil mengurangi banjir di Kabupaten Bekasi pada awal tahun 2022 ini.

Ia mengatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Tahunan Satgas Citarum Harum, di Aula Gedung Sate, Bandung, Senin (4/4).

Pt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki menyampaikan, bahwa dengan kinerja baik dari Satgas Citarum, sampah dalam sungai tersebut telah berkurang. Hal tersebut membawa dampak positif mengurangi banjir bagi wilayah sekitar, terutama di Kabupaten Bekasi.

"Tadi saya sampaikan dalam rapat, Satgas Citarum Harum ini sangat bermanfaat keberadaannya terutama bagi

masyarakat Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah sampah mulai berkurang di sungai Citarum, hal itu juga yang membuat banjir yang dikhawatirkan terjadi di awal tahun ini tidak terjadi," ucapnya.

Dari capaian tersebut, 13 tanggul kritis di Kabupaten Bekasi telah mendapatkan penanganan sementara oleh BBWS Citarum. Sedangkan, sebanyak 5 tanggul kritis di Kecamatan Cabangbungin akan diperbaiki secara permanen pada tahun 2023.

"Dari 49 titik tanggul kritis, 13 sudah diperbaiki walaupun sementara. Saya telah meminta kepada BBWS Citarum untuk memperbaikinya secara permanen," terangnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (5/4).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan arahnya agar

seluruh pihak terkait dalam Satgas Citarum Harum dapat terus bersemangat, serta dapat lebih berinovasi dalam memperbaiki sungai Citarum.

"Citarum ini kompleks sekali. Jadi jika ada ketidaksempurnaan, jangan patah semangat, kita bisa memperbaiki. Lakukan inovasi pada hal yang perlu dilakukan," katanya.

Ia berharap Ketua Harian Satgas Citarum Harum dapat memberikan laporan evaluasi kinerja yang telah dikerjakan selama 3 tahun ini, berikut dengan analisa dan solusi penyelesaiannya.

Tak hanya itu, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo juga meminta agar masing-masing pemerintah daerah di sekitar sungai Citarum untuk segera mencari langkah guna tercapainya sasaran kinerja Satgas Citarum Harum yang harus



FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI.

Pt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (kiri atas) saat menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPDP Kabupaten Bekasi Tahun 2023 di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Selasa (29/3).

dicapai bersama.

"Saya titikberatkan masalah pengelolaan, karena melebarakan, mendalamkan, pengelolaan, pengawasan, dan edukasi ini masing-masing harus kita jabarkan menjadi

metode tingkatan pekerjaan beesama. Karena ada progres yang harus dicapai, maka pemda diharapkan bisa segera mencari langkah untuk mencapai sasaran kerja tersebut." tuturnya. ● mdl

Kejagung Hibahkan 16.000 M2 Tanah untuk Pembangunan SMPN 21 Depok

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota Depok menerima hibah tanah seluas 16.000 meter persegi dari Kejaksanaan Agung (Kejagung). Hibah tanah ini akan dibangun Sekolah, Puskesmas, serta untuk Taman Pemakaman Umum (TPU).

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis) Kota Depok, Sutarno mengatakan hibah tanah dari Kejagung ini terletak di dua tempat. Yaitu, satu titik seluas 8.000 meter persegi di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere. Satu titik lagi seluas 8.000 meter persegi, di Kelurahan Gandul, juga di Kecamatan Cinere.

"Hibah tanah Pangkalan Jati untuk TPU. Hibah tanah Gandul untuk Pembangunan SMPN 21 dan Puskesmas," ujar Sutarno, Selasa (5/4).

Sutarno menyampaikan maksud hibah tanah agar

TPU, SMPN 21, dan Puskesmas bisa segera terealisasi. Menurut orang nomor dua di Disdik Kota Depok itu, masyarakat di Pangkalan Jati membutuhkan adanya lahan TPU. Untuk Gandul, masyarakat membutuhkan SMPN 21 memiliki gedung sendiri termasuk dengan Puskesmas.

Di Gandul saat ini sudah ada SMPN 21. Tapi SMPN dimaksud belum punya gedung sendiri. Dikatakan Sutarno, masyarakat Gandul sangat antusias dengan rencana pembangunan SMPN 21. Antusiasme itu ditandai dengan harapan mereka untuk segera dilakukan pembangunan di hibah lahan itu.

"Masyarakat Gandul mendambakan gedung SMPN 21 dan puskesmas di daerahnya," ujarnya. Disdik Kota Depok menyambut baik hibah tanah Kejagung. "Kami (Disdik), mengucapkan terima kasih kepada Kejagung yang telah berupaya optimal menyerahkan aset ini. Kami menerima dengan tangan terbuka bahwa salah satu tujuan penyerahan ini dalam rangka pendirian SMPN, puskesmas dan TPU," terang Sutarno. Sutarno mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan instrumen penting dalam pengembangan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Untuk itu, program perluasan akses dan pemerataan pendidikan terus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat di Kota Depok." ● yan

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan likuidasi dari PT. CW INDONESIA (dalam likuidasi) (selanjutnya disebut "Perseroan") berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini diberitahukan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada pembayaran kepada Kreditor, karena sampai efektifnya likuidasi, yaitu tanggal 14 Januari 2022, Perseroan tidak mempunyai Kreditor;
2. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi akan dibayarkan kepada para pemegang saham.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) b UU No.40 Tahun 2007 (UUPT).

Jakarta, 6 April 2022

PT. CW INDONESIA (dalam likuidasi)

Ttd
LIKUIDATOR